Policy Brief December 2025

Pemuda 'Tancap Gas' di Sawah, Sulbar Anti Gagal Panen!

JORDY
jordy1998@mail.ugm.ac.id

Sektor perberasan masih menjadi urat nadi sistem pangan di Indonesia, terkait dengan posisi beras sebagai makanan pokok, penyangga ketahanan pangan, pengidupan bagi jutaan petani skala kecil dan penggerak pembangunan perdesaan. Dalam rangka menghadapi tantangan produksi pangan seiring dengan perkembangan penduduk, perubahan iklim dan krisis kesehatan, menjadi penting untuk melibatkan pemuda dalam pertanian. Untuk mengatasi masalah penurunan produksi padi dan regenerasi petani di Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu membentuk Komunitas Pemuda Tani Sulbar. Program ini akan fokus pada pelatihan modern, dukungan permodalan dan pendampingan, penggunaan varietas padi unggul, bantuan pemasaran, adopsi teknologi, dan inovasi pertanian. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik minat pemuda untuk terjun ke sektor pertanian, meningkatkan ketahanan pangan, mengatasi pengangguran, serta mendorong modernisasi pertanian dan pembangunan ekonomi daerah.

KONTEKS

Beras merupakan komoditas strategis yang menjadi urat nadi ketahanan pangan nasional dan penyangga kehidupan masyarakat perdesaan di Indonesia. Namun, Sulawesi Barat (Sulbar) saat ini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, tekanan permintaan pangan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 26.500 jiwa per tahun. Di sisi lain, kemampuan daerah dalam menyediakan pangan justru mengalami degradasi yang mengkhawatirkan. Data tahun 2024 menunjukkan produksi padi di Sulbar anjlok drastis menjadi 291,47 ribu ton, turun sekitar 18% (62,04 ribu ton) dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 353,51 ribu ton. Penurunan produksi ini terjadi hampir di setiap bulan sepanjang tahun, yang menjadi sinyal merah bagi stabilitas pangan daerah.

Akar permasalahan dari defisit produksi ini bersifat multidimensi. Pertama, krisis regenerasi petani. Sensus Pertanian mencatat penurunan jumlah petani perorangan sebesar 1.413 orang (0,68%) dalam satu dekade terakhir. Profesi ini ditinggalkan karena rendahnya kesejahteraan, dengan rata-rata pendapatan petani hanya berkisar Rp54.000, yang memicu alih profesi dan urbanisasi pemuda. Kedua, faktor input dan lahan. Mahalnya harga pupuk (mencapai Rp100 ribu/sak untuk urea subsidi) dan konversi lahan sawah menjadi non-pertanian yang menurunkan luas panen dari 69,32 ribu hektar menjadi 58,61 ribu hektar, semakin menyulitkan petani untuk berproduksi secara optimal.

Ketiga, kerentanan terhadap iklim. Perubahan siklus hidrologi yang ekstrem, seperti banjir dan kekeringan berkepanjangan, telah memicu gagal panen dan peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Jika dibiarkan, kombinasi antara penurunan kapasitas produksi, krisis regenerasi SDM, dan tekanan iklim ini tidak hanya akan menyebabkan kerawanan pangan dan lonjakan inflasi beras, tetapi juga meningkatkan angka kemiskinan dan potensi keresahan sosial di Sulawesi Barat. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang berfokus pada modernisasi aktor (pemuda) dan adaptasi teknologi iklim menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda.

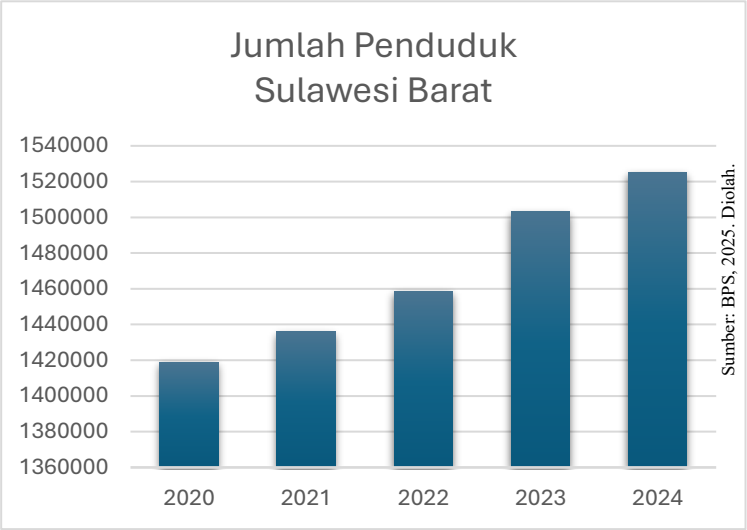

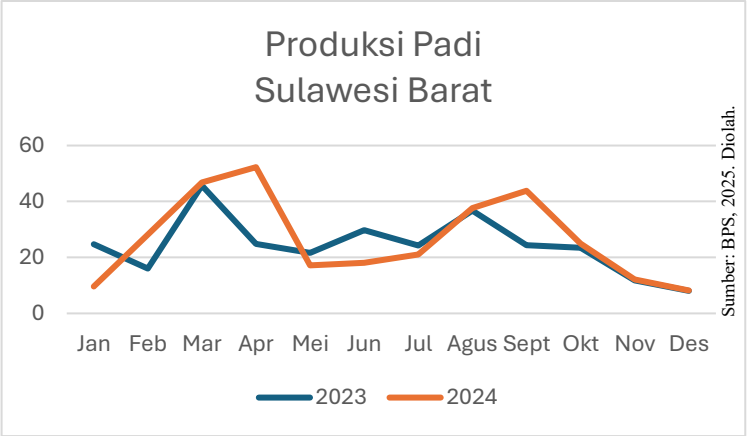

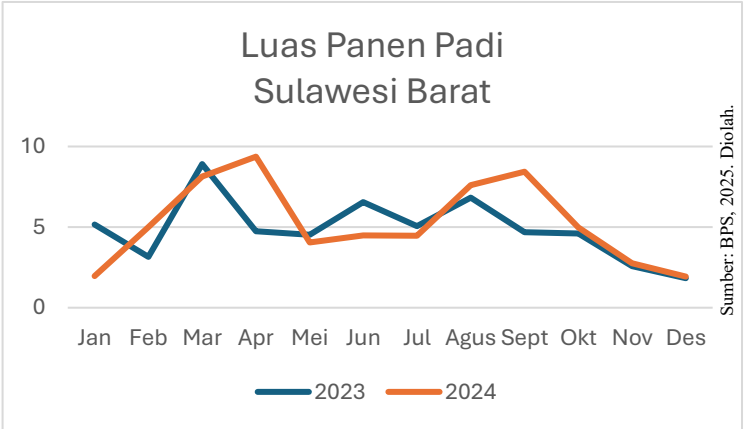

Dampak Negatif

1. **Kerawanan pangan**: Penurunan produksi padi di Sulbar akan mengurangi ketersediaan beras dan berpotensi menyebabkan kelangkaan. Kondisi ini dapat memicu kenaikan harga beras, sehingga menyulitkan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, untuk mengakses pangan pokok. Akibatnya, kualitas konsumsi pangan masyarakat menurun dan meningkatkan risiko gizi buruk, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
2. **Kemiskinan**: Penurunan produksi padi berdampak langsung pada penurunan pendapatan petani, yang dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan dan meningkatkan angka kemiskinan di pedesaan. Melemahnya sektor pertanian padi jugaberpotensi meningkatkan pengangguran di kalangan petani dan buruh tani. Ini dapat memperlebar kesenjangan sosial antara masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya dan yang tidak.
3. **Keresahan Sosial**: Kelangkaan dan kenaikan harga pangan dapat menciptakan keresahan sosial yang berujung pada konflik, seperti penjarahan atau demonstrasi, juga dapat memicu ketidakstabilan politik karena masyarakat merasa pemerintah tidak mampu menjamin kebutuhan pangan masyarakat. Di sisi lain, sulitnya mencari penghidupan di sektor pertanian akibat kelangkaan pangan dan minimnya lapangan pekerjaan,akan mendorong migrasi penduduk dari desa ke kota atau daerah lain.

KENAPA SULAWESI BARAT MENGALAMI PENURUNAN PRODUKSI PADI

Penurunan jumlah petani dan alih fungsi lahan

Data BPS, jumlah petani di Sulawesi Barat dalam sepuluh tahun terakhir semakin menurun. BPS Sulbar merilis hasil sensus pertanian 2024 di Sulbar yang menunjukkan penurunan jumlah petani, dari 207.721 usaha pertanian perorangan di tahun 2014 menjadi 206.308 usaha pertanian perorangan di tahun 2024. Artinya ada penurunan usaha pertanian perorangan sebesar 0,68% atau sebesar 1.413 selama sepuluh tahun terakhir. Rendahnya pendapatan petani menjadi faktor utama yang menyebabkan adanya penurunan jumlah petani. Rata-rata pendapatan petani di Sulbar adalah sekitar Rp54.000. hal ini membuat banyak petani memilih untuk beralih profesi agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Pendapatan yang rendah menyebabkan rendahnya minat generasi muda untuk bertani. Kemudan terjadinya konversi lahan-lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian seperti pemukiman yang mengurangi luas lahan yang tersedia untuk produksi padi yang berdampak langsung pada penurunan produksi padi. Hal ini bisa dikaitkan dengan menurunnya luas panen padi di Sulbar, yang pada tahun 2024 masih sebanyak 69,32 ribu hektar, menurun menjadi 58,61 ribu hektar di tahun 2025.

Usaha pertanian perorangan (UTP) Sulbar			
2014	**2024**	**Pengurangan**	**%**
207.721	206.308	1.413	-0,68

Sumber: BPS, 2025. Diolah.

Pupuk dan bibit mahal

Pupuk dan ketersediaan bibit menjadi salah satu masalah yang serius dari para petani. Mulai dari keterlambatan masuknya pupuk, harga pupuk tersebut, hingga dampak yang ditimbulkan karena penggunaan pupuk pada lingkungan. Meskipun sudah ada pupuk super nano yang dapat meningkatkan kapasitas produksi pertanian, tetapi harganya masih sangat tinggi. Hitungan Politani Pertanian UNHAS, dibutuhkan setidaknya 250kg pupuk/ha. Realitanya saat ini, rata-rata penggunaan pupuk baru sampai pada angka 150kg pupuk/ha. “Sekarang pupuk subsidi jenis urea sudah di atas 100 ribu/sak”, ujar salah satu petani yang mengeluhkan mahalnya harga pupuk.

Selain itu, banyaknya mafia pupuk dan politisasi distribusi bibit juga menjadi penyebab dari tingginya harga pupuk dan terjadinya kelangkaan bibit padi. Praktik korupsi yang banyak terjadi dalam ditribusi pupuk dan bibit serta ketidakadilan distribusi mempengaruhi akses petani pada peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian, yang pada akhirnya menghambat upaya untuk memenuhi permintaan beras masyarakat.

Perubahan iklim dan bencana alam

Perubahan iklim telah menyebabkan perubahan signifikan dalam siklus hidrologi, ditandai dengan perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Dampaknya, sektor pertanian mengalami pergeseran pola dan kalender tanam serta peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang pada akhirnya menyebabkan penurunan hasil produksi pertanian secara keseluruhan.

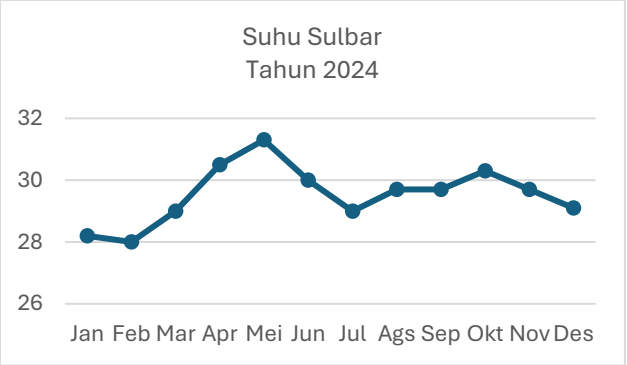

Sumber: BPS, 2025. Diolah.

Masalah infrastrutur pertanian

Minimnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru, ditambah lagi dengan kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam. Hal ini mengakibatkan daya dukung irigasi pertanian melemah, sehingga sawah tidak mendapatkan pasokan air yang cukup dan berdampak pada penurunan produksi padi.

SIAPA YANG MAU JADI PETANI
JIKA KEADAANNYA MEMPERIHATINKAN SEPERTI INI

Puluhan Hektare Padi di Polman, Terancam Gagal Panen

Radar Sulbar - Daerah, News

12 September 2024

Berita Polman

20 Hektar Sawah Terancam Gagal Panen di Tinambung Polman, Petani Cemas: 3 Bulan Tidak Hujan

Tribun@ Selasa, 14 September 2024 11:45 WITA

BMKG

Dilanda Banjir, Petani Padi dan Jagung di Mamuju Gagal Panen

Redaksi - Utama

Selasa, 17 Mei 2022 - 11:43 WIB

Berdasarkan analisis masalah di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat direkomendasikan untuk mengambil dua langkah strategis berikut:

Rekomendasi 1: Pembentukan Ekosistem "Agropreneur" Melalui Program Komunitas Pemuda Tani Sulbar (KPTS)
Program ini bukan sekadar pembentukan kelompok, melainkan penciptaan ekosistem bisnis pertanian terintegrasi (hulu-hilir) untuk menarik kembali minat generasi muda melalui modernisasi dan jaminan pasar.

Implementasi Teknis:

1. Inkubasi & Modernisasi: Pemerintah menyediakan pelatihan vokasi berbasis teknologi ("Smart Farming"), mencakup penggunaan *Internet of Things* (IoT) untuk penyiraman/pemupukan presisi guna efisiensi biaya input. Model ini dapat mengadopsi keberhasilan *Millenial Smart Farming* di Bali.
2. Akses Permodalan & Aset: Memberikan skema bantuan modal awal khusus pemuda dan akses pinjam pakai lahan tidur milik pemerintah daerah untuk dikelola oleh komunitas ini.
3. Jaminan Pasar (Off-taker): Pemerintah memfasilitasi kemitraan strategis dengan ritel modern dan Bulog lokal untuk menyerap hasil panen KPTS, serta membantu *branding* produk beras lokal agar memiliki nilai tambah.

Target Aktor Pelaksana:

- Gubernur Sulawesi Barat: Sebagai inisiator kebijakan dan penerbit regulasi payung hukum.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan: Sebagai pelaksana teknis pelatihan, penyediaan alsintan (alat mesin pertanian), dan pendampingan penyuluh.

- Dinas Pemuda dan Olahraga: Untuk rekrutmen dan sosialisasi program kepada basis pemuda.
- BUMD/Perbankan Daerah**:** Sebagai penyalur skema kredit usaha tani (KUR) khusus pemuda.

Rekomendasi 2: Adopsi Varietas Adaptif Iklim "Gamagora 7" Melalui Kerjasama Strategis Pemerintah-Universitas (G2U)

Untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang menjadi penyebab utama gagal panen, Pemprov Sulbar harus beralih dari benih konvensional ke varietas yang teruji secara ilmiah tahan terhadap anomali iklim.

Implementasi Teknis:

1. Kerjasama Pengadaan Benih: Pemprov Sulbar melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) langsung dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk pengadaan benih varietas Gamagora 7. Varietas ini dipilih karena memiliki keunggulan amfibi; tahan terhadap genangan air (banjir) maupun kondisi lahan kering (kekeringan).
2. Distribusi & Demplot: Memangkas rantai birokrasi distribusi benih agar langsung diterima oleh Komunitas Pemuda Tani tanpa perantara (meminimalisir mafia bibit). Membuat lahan percontohan (*demonstration plot*) di area rawan bencana banjir/kekeringan untuk membuktikan efektivitas hasil panen kepada petani lain.
3. Mitigasi Risiko: Penggunaan benih ini harus disertai dengan perbaikan jaringan irigasi tersier secara padat karya yang melibatkan petani setempat.

Target Aktor Pelaksana:

- Dinas Pertanian Provinsi & Kabupaten: Bertanggung jawab atas pengadaan, distribusi langsung, dan pengawasan di lapangan.
- Universitas Gadjah Mada (UGM): Sebagai penyedia benih sumber dan tenaga ahli pendamping untuk transfer pengetahuan budidaya Gamagora 7.
- Dinas Pekerjaan Umum (SDA): Untuk dukungan rehabilitasi infrastruktur irigasi yang rusak di lokasi target penanaman.